

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini menerapkan sistem otonomi daerah dimana dalam pelaksanaan pemerintah dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Sistem otonomi daerah diterapkan karena beberapa alasan, terutama mengingat banyaknya ketimpangan yang harus dilayani oleh pemerintah pusat. Otonomi daerah diharapkan setiap daerah dapat merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang mendukung Pembangunan daerah secara mandiri. Sejalan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, membuat banyak kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mengerjakan urusan pemerintahnya masing-masing. Undang-Undang ini sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Sistem ini harus diubah agar meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat dan mendorong inovasi untuk menghasilkan sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran pemerintah daerah.

Salah satu sumber pendapatan yang dapat digunakan oleh daerah untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahannya bisa diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan yang berasal langsung dari daerah tersebut. Pajak daerah dan retribusi daerah adalah sumber pendapatan daerah yang sangat berharga. Dalam pasal 1 ayat 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa retribusi daerah

merupakan pungutan daerah yang dikenakan sebagai pembayaran untuk jasa, pelayanan, atau izin tertentu yang diberikan atau difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu dan perorangan.

Sebagaimana dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan sah lainnya. Menurut Marteen dan Robert (2001), di antara sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, pajak dan retribusi daerah diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan. Akan tetapi, penerimaan dari retribusi daerah umumnya masih jauh dari bawah penerimaan pajak daerah. Berikut adalah data penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang pada tahun 2020-2023:

Tabel 1.1

**Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang Tahun 2020-
2023**

SUBJEK	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (dalam ribu rupiah)			
	2020	2021	2022	2023
Pendapatan Daerah	4.400.500.838.480	4.822.887.281.737	4.969.436.543.013	4.828.502.867.632
1. Pendapatan Asli Daerah	2.024.537.808.307	2.385.944.758.477	2.545.991.747.658	2.865.712.538.632
a. Pajak Daerah	1.425.695.913.644	1.445.171.299.551	1.956.226.658.076	2.190.083.500.000
b. Retribusi Daerah	88.681.866.360	96.448.844.019	101.044.938.813	149.306.250.120
c. Hasil daerah	53.339.018.950	66.895.891.301	66.717.312.156	73.297.199.962
d. PAD lain-lain yang sah	456.821.009.353	777.428.723.606	422.002.778.613	453.025.588.550
2. Dana Perimbangan	1.669.101.931.826	1.699.819.686.103	1.789.632.874.636	1.888.328.344.523
3. Pendapatan Lain yang sah	707.871.098.347	737.112.837.157	155.318.614.370	159.139.881.925

Sumber: Badan Pusat Statistika (BPS) Kota Semarang

Tabel 1.1 mengenai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang dari tahun 2020 hingga 2023, terlihat bahwa penerimaan pajak daerah Kota Semarang pada tahun 2020 Rp. 1.425.695.913.644 sedangkan penerimaan retribusi daerah sebesar Rp. 88.681.866.360. Penerimaan pajak daerah tahun 2021 Rp. 1.445.171.299.551 sedangkan penerimaan retribusi daerah sebesar Rp. 96.448.844.019. Penerimaan pajak daerah pada tahun 2022 Rp. 1.956.226.658.076 sedangkan penerimaan retribusi daerah sebesar Rp. 101.044.938.813. Penerima

pajak daerah pada tahun 2023 Rp. 2.190.083.500.000 sedangkan retribusi daerah sebesar Rp. 149.306.250.120. Penerimaan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang tersebut terlihat bahwa retribusi daerah Kota Semarang masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah Kota Semarang. Dilansir dari *semarangkota.go.id* menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang pada tahun 2023 dengan jumlah 2,19 triliun, hanya mencapai 97% atau kurang 3% dari target yang ditentukan. Hal tersebut terjadi karena adanya kebocoran dari sistem retribusi salah satunya retribusi parkir maka dari itu perlu adanya inovasi agar pendapatan dapat maksimal.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah retribusi, yang memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah lainnya. Salah satu kelebihan dari retribusi daerah adalah kemampuannya untuk memberikan pendapatan secara berkelanjutan karena retribusi masih dapat terus dipungut dari masyarakat dan pengguna layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah (Pasla, 2016). Retribusi parkir adalah salah satu komponen dari retribusi daerah yang berperan sebagai salah satu sumber utama pendapatan asli daerah dan digunakan untuk membiayai pengelolaan serta perbaikan fasilitas parkir serta mendukung pembangunan infrastruktur lainnya.

Retribusi parkir merupakan suatu bentuk pungutan atau biaya yang dikenakan oleh pemerintah daerah terhadap pengguna jasa parkir di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah atau pihak yang diberi izin oleh pemerintah. Retribusi Parkir Menurut Yani (2012) merupakan pungutan yang dikenakan sebagai pembayaran untuk jasa atau izin parkir yang khusus disediakan dan atau diberikan

oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi parkir menjadi potensi penting dalam pengelolaan pendapatan daerah di wilayah tersebut. Pendapatan yang diperoleh dari retribusi parkir dialokasikan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur parkir untuk membuat parkir lebih efisien dan tidak mengganggu pengguna jalan lain. Seiring dengan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir, inovasi dalam sistem pembayaran parkir mulai diterapkan untuk mengatasi tantangan yang ada.

Parkir elektronik atau yang lebih dikenal sebagai *e-parking*, adalah salah satu inovasi yang sedang berkembang pesat di berbagai kota besar. Sistem ini dirancang untuk memodernisasi manajemen parkir, menggantikan metode konvensional yang bergantung pada pembayaran tunai atau manual. Pengguna parkir dapat membayar melalui aplikasi atau perangkat elektronik lainnya tanpa perlu mencari mesin pembayaran atau membayar langsung ke petugas parkir. Selain mempermudah pengguna, sistem *e-parking* juga menawarkan banyak manfaat. Melalui penerapan teknologi ini, pemerintah dapat memantau transaksi secara real-time, mengurangi potensi pembocoran pendapatan, dan memastikan pengumpulan retribusi parkir yang lebih terstruktur dan jelas. Melalui pengawasan yang lebih efisien, *e-parking* juga dapat meningkatkan kualitas layanan parkir bagi masyarakat, serta mendukung terciptanya lingkungan perkotaan yang lebih teratur dan terencana, yang sejalan dengan konsep smart city.

Sistem parkir elektronik (*e-parking*) telah berhasil diimplementasikan di berbagai kota besar di Indonesia sebagai bagian dari usaha untuk memperbarui dan menyempurnakan sistem pengelolaan parkir. Kota-kota seperti Jakarta, Surabaya,

Makassar, Bandung, dan Surakarta telah lebih dahulu mengadopsi teknologi ini sebagai solusi dalam mengelola parkir secara lebih efisien (Hayati, 2018). Sistem e-parking berfungsi untuk memfasilitasi pembayaran parkir secara elektronik, yang tidak hanya mempermudah transaksi bagi pengguna jasa parkir tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pengelolaan dan pelayanan publik. Implementasi sistem ini memungkinkan pemerintah untuk lebih efektif dalam memonitor dan mengelola pendapatan dari sektor parkir, sekaligus mengurangi potensi pungutan liar yang dapat merugikan pendapatan daerah. Selain itu, e-parking menawarkan peningkatan dalam hal efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan layanan parkir, memungkinkan pengguna untuk lebih cepat dan nyaman dalam membayar biaya parkir. Program ini juga berperan penting dalam mewujudkan konsep smart city, di mana teknologi digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui sistem yang lebih cerdas dan terintegrasi (Pradita & Utomo, 2021).

Kota Semarang juga mengimplementasikan program parkir elektronik (*e-parking*) untuk meningkatkan efisiensi dan pengelolaan parkir di wilayahnya. Hal ini di atur dalam peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum menetapkan penerapan e-parking di seluruh area parkir Kota Semarang, termasuk di tepi jalan umum, mulai tahun 2022. Parkir elektronik (*e-parking*) awalnya diterapkan pada empat lokasi jalan yaitu Jalan MT Haryono dari simpang Pringgading hingga Jalan Sidorejo, Jalan Agus Salim dari simpang Pekojan hingga Bubukan, Jalan Wahid Hasyim dari Kauman hingga Simpang Benteng, dan Jalan Pekojan sampai Jalan Inspeksi (*Kompas.com*, 2022).

Gambar 1.1
Parkir Elektronik (*E-parking*) Kota Semarang



Sumber: Kompas.com

Dapat dilihat pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa beberapa area Kota Semarang telah menerapkan sistem parkir elektronik. Program *e-parking* menjadi langkah strategis untuk mengelola dan mengatur parkir seiring dengan pertumbuhan pesat yang dialami kota ini. Kota Semarang mengalami peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya yang dimana berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah menunjukkan bahwa pada tahun 2020 jumlah penduduk mencapai 1.653.524 jiwa dan meningkat lagi pada tahun 2022 menjadi 1.659.975 jiwa. Pertumbuhan penduduk ini menghadirkan keuntungan untuk penambahan jumlah kendaraan pribadi seperti yang ditunjukkan dalam tabel 1.2 mengenai jumlah kendaraan pribadi di Kota Semarang, maka penerapan sistem parkir elektronik menjadi sangat penting untuk memastikan pengelolaan parkir yang efisien dan teratur.

Tabel 1.2

Jumlah Kendaraan Pribadi di Kota Semarang Tahun 2020-2021

Tahun	Mobil	Motor
2017	226.064	1.251.200
2018	215.182	1.295.360
2019	225.779	1.347.260
2020	23.164	1.382.434
2021	281.971	1.512.234

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Tabel 1.2 menunjukkan rata-rata perkembangan kendaraan pribadi di Semarang, baik sepeda motor maupun mobil penumpang sebesar 5,97% selama lima tahun terakhir. Walaupun jumlahnya bervariasi setiap tahunnya, terdapat peningkatan yang signifikan di beberapa tahun tertentu. Secara keseluruhan, selama periode ini terjadi peningkatan yang signifikan. Tabel 1.3 menunjukkan perbandingan jumlah kendaraan di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2019-2021.

Tabel 1.3

Perbandingan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2019-2021

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2019	2020	2021
Kota Semarang	17.459.509	18.141.696	20.320.743
Kabupaten Cilacap	1.651.895	1.6930.227	1.875.781
Kabupaten Klaten	787.181	818.330	888.484

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2019	2020	2021
Kabupaten Banyumas	761.078	781.434	829.219
Kabupaten Pati	7567.227	686.647	718.265
Kabupaten Jepara	664.382	656.786	681.639
Kabupaten Tegal	631.933	632.8584	657.585
Kabupaten Grobongan	608.123	612.426	639.943
Kabupaten Sukoharjo	584.981	592.169	611.541
Kabupaten Sragen	572.797	584.322	619.133
Kabupaten Demak	566.687	564863	581.045
Kota Surakarta	548.681	562.005	845.188
Kabupaten Pemalang	551.607	560.268	583.768
Kabupaten Semarang	536.279	538.717	559.805
Kabupaten Karanganyar	525.344	537.033	622.423
Kabupaten Kudus	516.046	536.160	554.246
Kabupaten Kebumen	518.074	534.564	566.639
Kabupaten Boyolali	510.357	526.578	539.847
Kabupaten Kendal	506.283	520.805	539.376
Kabupaten Magelang	493.958	516.960	539.962
Kabupaten Wonogiri	414.141	430.017	689.950
Kabupaten Pekalongan	407.078	415.734	425.290
Kabupaten Brebes	605.648	413.109	798.187
Kabupaten Blora	388.247	339.887	512.459

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2019	2020	2021
Kota Magelang	106.668	399.887	693.292
Kabupaten Purbalingga	383.438	397.438	421.846
Kabupaten Banjarnegara	344.840	354.695	364.550
Kabupaten Batang	335.006	349.832	364.658
Kabupaten Purworejo	316.401	328.293	340.185
Kabupaten Wonosobo	288.286	300.828	313.310
Kabupaten Temanggung	288.573	299.176	317.240
Kabupaten Rembang	274.157	280.487	309.672
Kota Pekalongan	191.093	197.766	222.043
Kota Tegal	178.272	182.612	175.601
Kota Salatiga	142.514	146.412	91.971

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Pada tabel 1.3 menunjukkan peningkatannya yang cukup besar dalam jumlah mobil di Jawa Tengah, dengan lebih dari 1000 kendaraan per tahun. Kota Semarang adalah salah satu kota terbesar di Provinsi Jawa Tengah, namun sebagian besar kota dan kabupaten lain di Jawa Tengah tidak mencapai jumlah seperti Kota Semarang. Besarnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi di Kota Semarang mengakibatkan kepadatan lalu lintas yang semakin parah. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah kendaraan pribadi. Kemacetan lalu lintas menjadi permasalahan yang semakin berkembang karena berkaitan erat dengan manajemen lalu lintas. Urbanisasi yang semakin pesat memudahkan

masyarakat untuk memiliki transportasi pribadi sehingga masalah parkir semakin meningkat. Peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi memperburuk situasi parkir karena ketersediaan lahan parkir yang terbatas. Hal tersebut membuat banyak kendaraan yang di parkir sembarangan di tepi jalan atau area yang tidak diperuntukan untuk parkir sehingga membuat kemacetan dan mengganggu fungsi jalan. Kurangnya fasilitas parkir yang memadai dapat menghambat keberhasilan program-program yang dirancang untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan kualitas lalu lintas di Kota.

Kemacetan tidak hanya disebabkan oleh meningkatnya kendaraan pribadi, namun juga karena kurangnya manajemen parkir yang tidak efektif. Salah satu permasalahan utama adalah parkir liar yang muncul karena keterbatasan lahan parkir yang ada, sehingga banyak kendaraan terparkir di tepi jalan umum yang bukan termasuk tempat parkir. Kebiasaan masyarakat memarkirkan kendaraan di area yang tidak diperuntukkan sebagai tempat parkir juga menyebabkan gangguan lalu lintas yang mengganggu pengoperasian jalan yang seharusnya diperlukan untuk dalam keadaan darurat. Masalah tersebut berdampak negatif pada berbagai upaya yang dirancang untuk mengatasi kemacetan. Ketidakmampuan program dalam mengatasi parkir liar dan penggunaan ruang jalan yang salah membuat upaya mengurangi kemacetan menjadi kurang efektif. Parkir kendaraan di tempat yang tidak seharusnya mengganggu fungsi jalan dan memperlambat lalu lintas. Sehingga yang dimana program tersebut dirancang untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisien transportasi kini malah menjadi kurang efektif dan memerlukan perbaikan serta penyesuaian agar dapat hasil yang diinginkan.

Bertambahnya jumlah kendaraan memerlukan tempat parkir, tetapi karena terbatasnya tempat parkir banyak sekali juru parkir tidak resmi yang menciptakan tempat parkir sendiri dan menarik tarif parkir diluar kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan banyak juru parkir melakukan pungutan liar kepada pemilik kendaraan. Retribusi parkir adalah pembayaran yang dikenakan untuk penggunaan area yang diatur oleh Pemerintah Daerah, dan ada kemungkinan adanya kerja sama dengan sektor swasta dalam pelaksanaannya. Penetapan tarif retribusi parkir di Kota Semarang diatur melalui Peraturan Walikota Semarang. Peraturan yang mengatur mengenai retribusi jasa usaha yang didalamnya memuat retribusi parkir adalah Peraturan Walikota Semarang No. 9 Tahun 2018 berisi retribusi parkir tepi jalan umum yang dikenakan sebesar Rp. 2.000 untuk kendaraan motor, Rp. 3.000 untuk kendaraan mobil, dan Rp. 15.000 untuk kendaraan roda enam.

Peraturan Walikota Semarang No. 9 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum memberikan dasar untuk membuat kebijakan. Peningkatan pendapatan asli daerah bertujuan untuk menjamin kualitas pembangunan daerah, undang-undang ini dapat mendukung kesejahteraan masyarakat. Peraturan tersebut akan memberikan penjelasan rinci mengenai tarif yang dibayarkan kepada setiap penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum Kota Semarang yang bergantung pada zona wilayah baik itu di kawasan pusat kota, kawasan penyangga kota ataupun kawasan pinggiran kota. Sayangnya, pendapatan dari biaya parkir masih kurang atau belum mencapai potensi maksimum yang telah ditentukan. Penerimaan pendapatan daerah dari pengenaan retribusi parkir hampir

tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut Tabel 1.4 berisi tentang tujuan dan pencapaian parkir di sepanjang jalan umum Kota Semarang sebelum dan sesudah diterapkannya sistem *e-parking*.

Tabel 1.4

**Target dan Realisasi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang Tahun
2018-2022**

Tahun	Target	Realisasi	Tingkat capaian (%)
2018	15.000	2.441	16,27
2019	29.261	2.525	8,63
2020	2.100	2.181	103,85
2021	1.700	1.887	111,00
2022	4.640	2.826	60,91

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2023

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada tabel 1.4 terlihat bahwa target pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum meningkat mencapai Rp. 15.000.000.000 pada tahun 2018 dan 2019 mencapai Rp. 29.261.000.000. Sementara pada tahun 2020 dan 2021, target yang ingin dicapai mengalami penurunan yaitu sebesar 2.100.769.000, karena target tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan keadaan perekonomian Kota Semarang yang sedang terpuruk dan mewabahnya pandemi Covid-19. Realisasi pendapatan retribusi parkir tidak memenuhi target hanya di tahun 2018 dan tahun 2019, namun pada tahun 2020 dan tahun 2021 melebihi target yang ditetapkan, sedangkan pada tahun 2022 tidak mencapai target yang telah ditentukan. Maka, Dinas Perhubungan Kota Semarang

perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berdasarkan SK Nomor 180/70 Tahun 2023, retribusi parkir di tepi jalan umum hanya berhasil mencapai sebesar 64,94%. Hal ini disebabkan oleh berbagai permasalahan terkait pengelolaan parkir, diantaranya:

Pertama, masih adanya permasalahan parkir liar di Kota Semarang. Juru parkir liar telah menggunakan kekuasaannya untuk membuat lokasi parkir liar dengan mengatur ketentuan-ketentuan tertentu. Juru parkir liar didukung oleh pejabat setempat, sehingga juru parkir liar tersebut tidak menyerahkan retribusi parkir kepada Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan aturan (*PertamaNews.id*, 2023). Parkir liar merupakan masalah utama di Kota Semarang yang mengakibatkan retribusi parkir belum mencapai potensi maksimal. Walikota Semarang mengakui bahwa banyak orang tidak mematuhi larangan parkir dan masih banyak yang nekat parkir sembarangan. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan imbauan dan melakukan pengawasan agar terhindar dari masalah parkir liar. Selain itu, ada usulan untuk melegalkan beberapa titik parkir yang sebelumnya dilarang sebagai langkah antisipasi untuk meningkatkan retribusi parkir Kota Semarang (*Rejogja*, 2023).

Kedua, terdapat juru parkir yang menarik tarif parkir di luar kebijakan yang telah ditentukan. Permasalahan ini menyebabkan masyarakat mengeluh tentang tarif parkir yang berbeda-beda karena orang yang menggunakan layanan parkir harus membayar tarif yang mahal tetapi tidak menerima struk atau bukti pembayaran saat mereka parkir untuk memastikan bahwa mereka tidak kehilangan apa-apa. Selain itu, sistem parkir yang tidak jelas menyebabkan kebocoran

retribusi daerah. Seperti yang terjadi di Jalan Agus Salim Kota Semarang, bus pariwisata di depan toko Sango Keramik ditarik biaya parkir sebesar Rp 50.000 (*Semarangkota.go.id*, 2023).

Ketiga, yaitu kurangnya edukasi kepada masyarakat dan juru parkir untuk mendukung sistem *e-parking*. *E-parking* telah diterapkan di berbagai lokasi tertentu yang dimana masih terdapatnya juru parkir yang mencuri-curi kesempatan menerima tunai dan masih terdapatnya masyarakat membayar tarif pakai tunai (*Halosemarang.id*, 2023).

Berbagai permasalahan yang terjadi terkait *e-parking* di tepi jalan umum Kota Semarang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memerlukan strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Strategi Dinas Perhubungan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah setiap tahunnya dan untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait program *e-parking* di tepi jalan umum Kota Semarang. Diharapkan dengan diterapkannya *e-parking* di tepi jalan umum Kota Semarang, pendapatan daerah dapat meningkat. Pengenalan parkir elektronik juga merupakan gebrakan baru bagi Kota Semarang. Inovasi tersebut diharapkan dapat membawa transformasi dalam pengelolaan parkir yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Pada fenomena tersebut peneliti tertarik untuk meneliti “mengapa belum efektifnya alokasi retribusi *e-parking* terhadap PAD belum mencapainya target?. Peneliti ingin memfokuskan penelitian pada retribusi *e-parking* di tepi jalan umum Kota Semarang yang mana masih banyaknya parkir liar dan juru parkir yang nakal serta masih kurangnya edukasi masyarakat dan juru parkir terkait *e-parking*.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya parkir liar yang menyebabkan sektor retribusi parkir belum maksimal.
2. Masih terdapatnya juru parkir yang meminta tarif retribusi parkir diluar kebijakan yang ditentukan.
3. Masih kurangnya edukasi kepada masyarakat dan juru parkir dalam mendukung penerapan program *e-parking* di tepi jalan umum.

1.2.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah disesuaikan dengan kondisi dan fokus penelitian dalam program *e-parking* di tepi jalan umum sesuai dengan uraian di latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas program *e-parking* di tepi jalan umum dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang?
2. Apa saja faktor penghambat efektivitas program *e-parking* di tepi jalan umum dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis efektivitas program *e-parking* di tepi jalan umum dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat efektivitas program *e-parking* di tepi jalan umum dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Setelah menguraikan tujuan dari penelitian ini maka tentunya penelitian ini memiliki kegunaan yang diharapkan penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada perkembangan Ilmu Administrasi Publik, terutama dalam konteks kebijakan publik khususnya yang berkaitan dengan kebijakan penggunaan *e-parking*.
2. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis terhadap perkembangan teori-teori yang saat ini ada dengan kenyataan di lapangan sehingga penulis dapat memahami teori tersebut dengan jelas.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian yang dilakukan ini akan menambah pengetahuan dan ilmu yang diperoleh di masa perkuliahan terkait dengan kebijakan publik sehingga mampu memahami lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan program *e-parking* di tepi jalan umum Kota Semarang.

2. Bagi Instansi Terkait

Penelitian yang dilakukan ini dapat menjadi sumber informasi berguna untuk menilai perbaikan mendalam terkait efektivitas program serta faktor yang menghambat dalam pelaksanaan program *e-parking* di tepi jalan umum Kota Semarang.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pelaksanaan program *e-parking* untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap program *e-parking* di tepi jalan umum.

4. Bagi Pembaca

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan akan menjadi sumber referensi bagi peneliti lain dan digunakan sebagai bahan penelitian untuk meneliti efektivitas program *e-parking* di tepi jalan umum dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah panduan atau pedoman kerangka berpikir yang berguna untuk peneliti dalam mengkaji permasalahan yang akan diteliti. Terdapat 10 penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan topik penelitian yaitu efektivitas program dan juga parkir elektronik (*e-parking*) di tepi jalan umum. Berikut penelitian tersebut, diantaranya:

Tabel 1.5
Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Judul, Jurnal & Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian & Metode Penelitian	Teori Penelitian	Hasil
1.	Anggia Delta Utama, Hendrik Koeswara, & Muhammad Ichsan Kabulla, Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya,	Tujuannya untuk mengetahui bagaimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya melaksanakan Program KIA dan mengetahui faktor yang menghambat proses pelaksanaanya	Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang terdiri dari: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas pelaksana, lingkungan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program KIA yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya telah dilaksanakan, namun belum optimal. Masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program identifikasi anak di Dharmasraya berupa kurangnya pemahaman struktur program antar organisasi pengelola, akibat kurangnya komunikasi dan koordinasi akibat kurangnya pembagian kerja dan kerja

No	Penulis, Judul, Jurnal & Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian & Metode Penelitian	Teori Penelitian	Hasil
	Jurnal Administrasi, Manajemen dan Ilmu Sosial (JAEIS) Volume 2 Nomor 1; November 2023.	Metode yang digunakan deskriptif kualitatif.	sosial, ekonomi dan politik serta disposisi implementor.	antar pihak-pihak yang terlibat. Pengaruh faktor sosial, ekonomi dan politik serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang program identifikasi anak mempengaruhi pelaksanaan program identifikasi anak di kabupaten Dharmasraya.
2.	Ivana Romasi & Mohammad Ridwan, Efektivitas Penggunaan Sistem Parkir Elektronik (<i>E-parking</i>) Dalam Mewujudkan Smart City di Kota Medan, Jurnal Administrasi Publik Volume XIX (2) 2023: 276-297	Tujuannya untuk mengetahui seberapa efektif sistem parkir elektronik dalam mewujudkan smart city di Kota Medan. Metode yang digunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Siagian, yang terdiri dari: Sosialisasi Program, Pemahaman Program, Tujuan Program, Perubahan Nyata, dan Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang Bersifat Mendidik	Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem parkir elektronik (<i>e-parking</i>) belum efektif yang disebabkan karena sosialisasi yang tidak merata, kurangnya pemahaman program yang disebabkan terdapat juru parkir yang sudah berumur, juru parkir tidak tertib dengan aturan dan kurangnya sarana dalam menunjang keberhasilan program serta kurangnya personil lapangan untuk mengontrol Kota Medan secara menyeluruh.
3.	Pratiwi Novie Zoelanda, Endang Larasati, & Herbasuki Nurcahyanto, Peningkatan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang,	Tujuannya untuk mengevaluasi upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir Kota Semarang.	Soemitro dalam Sari (2017) yang terdiri dari: intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya peningkatan retribusi parkir di Kota Semarang dengan memperkuat manajemen lalu lintas belum sepenuhnya terlaksana karena masih banyak kekurangan. Sejauh ini, pekerjaan telah dilakukan untuk memperluas tempat parkir. Faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi parkir tepi jalan adalah pemahaman prinsip-

No	Penulis, Judul, Jurnal & Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian & Metode Penelitian	Teori Penelitian	Hasil
	Jurnal Of Public Policy And Management Review, Vol 11, No 3 (2022): 670-683	Hal ini dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam meningkatkan retribusi parkir Kota Semarang. Metode yang digunakan adalah kualitatif.		prinsip pengelolaan yang didukung dalam penerapan retribusi parkir. Tiga faktor lain yakni pengawasan, jumlah pegawai, sarana dan prasarana menjadi salah satu penyebab pengelola parkir tidak melakukan retribusi parkir di sepanjang jalan umum.
4.	Hilda Happy Ekaryn, Augustin Rina Herawati, & Dyah Hariani, Manajemen Parkir Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Perhubungan Kota Semarang, Journal Of Public Policy And Management Review, 11(3), 2022: 62-82	Tujuannya untuk melihat bagaimana manajemen parkir yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam meningkatkan PAD di Kota Semarang serta mengatasi kendala yang dihadapi saat menjalankan manajemen parkir tersebut.	George R. Terry (2006) yang mana menjelaskan fungsi manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen parkir di Dinas Perhubungan Kota Semarang masih kurang efektif. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa beberapa komponen bekerja dengan buruk saat diterapkan. Dinas Perhubungan Kota Semarang telah menetapkan tujuan dan inisiatif tahunan untuk mencapainya. Bagian yang berkaitan dengan pengorganisasian telah diselesaikan dengan baik. Untuk merencanakan struktur, pemerintah membuat tempat parkir khusus dan membagi tugas ke setiap seksi. Selain itu, bagian penggerak menunjukkan bahwa beberapa tugas program manajemen parkir

No	Penulis, Judul, Jurnal & Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian & Metode Penelitian	Teori Penelitian	Hasil
		Metode penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif.		masih tidak berjalan dengan baik atau sama sekali tidak berjalan karena tidak ada tindakan pembinaan dan penginformasian yang konsisten. Karena tidak ada waktu pengecekan dan hanya bergantung pada laporan pemasukan, bagian pengawasan tidak berjalan dengan baik. Bagian pergerakan juga menunjukkan bahwa beberapa kegiatan dalam program manajemen parkir masih tidak berjalan dengan baik atau sama sekali tidak berjalan dimana tidak ada pergerakan yang sama dalam pembinaan dan penginformasian. Bagian pengawasan belum berjalan maksimal dimana tidak ada waktu pengecekan dan hanya mengandalkan laporan pemasukan saja.
5.	Clarissa Calcabilla, Budiman, & Letizia Dyastari, Efektivitas Penerapan Parkir Elektronik (E-Parking) Dalam Pengelolaan Parkir di Kota Samarinda,	Tujuannya untuk menganalisis seberapa efektif penggunaan parkir elektronik (<i>e-parking</i>) dalam pengelolaan parkir di Kota Samarinda. Metode yang digunakan kualitatif.	Campbell J.P. dalam Primanda (2017) yaitu: Keberhasilan program, Keberhasilan sasaran, Kepuasan terhadap program, Tingkat input dan output, dan	Hasil penelitian menunjukkan penerapan parkir elektronik (<i>e-parking</i>) dalam pengelolaan parkir di Kota Samarinda dianggap belum efektif. Hal ini disebabkan tidak tercapainya target lokasi yang telah ditentukan yang disebabkan tidak tercapainya target lokasi yang telah ditentukan, tidak tercapainya target pendapatan, terdapat juru parkir liar, parkir elektronik yang dianggap rumit dan memakan waktu lama, kurangnya sosialisasi, kurangnya sumber daya

No	Penulis, Judul, Jurnal & Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian & Metode Penelitian	Teori Penelitian	Hasil
	Jurnal Ilmu Pemerintahan, 11(1), 2023: 9-17.		Pencapaian tujuan menyeluruh.	manusia, optimalisasi pendapatan retribusi parkir pinggir jalan umum yang tidak mencapai target.
6.	Fahreza Rafiki, Agus Sya'bani Arlan, Nida Urahmah, Efektivitas Program Pemberdayaan dan Pelatihan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Palampitan Hilir Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Al Lidara Balad Jurnal Administrasi Negara, vol 6 (1), 2024	Tujuannya untuk mengetahui efektif atau tidaknya program pemberdayaan dan pelatihan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Palampitan Hilir Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Metode yang digunakan kualitatif.	Budiani dalam buku Asima dan Piki (Siahaan, 2022) yaitu: ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan, dan pemantauan program.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan dan pelatihan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Palampitan Hilir Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup efektif jika dilihat dari beberapa indikator diantaranya pada ketepatan sasaran peserta program, sosialisasi program, pencapaian tujuan, pemantauan program. Ketepatan sasaran sudah cukup efektif dilihat dari komitmennya. Sedangkan sosialisasi program masih kurang efektif terlihat dari informasi belum tersampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat, pemahaman masyarakat terhadap program yang masih kurang, keberhasilan program yang belum sepenuhnya berhasil dan tidak adanya tindak lanjut program.
7.	Hasan Basri & Hajar Ashwad, Pengawasan dan Pengelolaan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh,	Tujuannya untuk menganalisis pengawasan dan pengelolaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten	Joko (2011) yang terdiri dari: pelaku pengawasan pelaksanaan kebijakan, standar operasional prosedur	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah atas biaya parkir jalan umum kurang efektif. Hal ini disebabkan karena adanya permasalahan dalam manajemen biaya parkir di pinggir jalan umum dan pembocoran biaya yang membuat tujuan tidak tercapai. Selain itu, masih ada ruang parkir

No	Penulis, Judul, Jurnal & Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian & Metode Penelitian	Teori Penelitian	Hasil
	Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi vol 17, 2021: 50-62.	Bener Meriah Provinsi Aceh. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif.	pengawasan, sumberdaya keuangan dan peralatan, dan jadwal pelaksanaan pengawasan.	yang enggan bekerja sama dengan pihak ketiga. Pemerintah daerah harus mengawasi dan mengelola pengelolaan retribusi sehingga berkontribusi pada pendapatan daerah. Hal ini akan membantu meminimalkan penyimpangan dari tujuan kebijakan yang ditetapkan sebelumnya. Jumlah pengawas yang kurang dan tidak sebanding dengan titik parkir saat ini menyebabkan pengelolaan retribusi parkir masih kurang.
8.	Zulkifli Anwar, Zaili Rusli, & Febri Yuliani, Pelayanan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Dumai, Jurnal Niara, 15(3), 2023: 424-442.	Tujuannya untuk menganalisis pelayanan parkir tepi jalan Umum di Kota Dumai berdasarkan persepsi pelanggan dan pengelola parkir. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif.	Zeithaml, dan Berry (1990) yang terdiri dari: Bentuk fisik (tangible), reliabilitas (keandalan), kejelasan dan kapasitas (transparansi), dan jaminan keamanan (security).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan parkir tepi jalan umum di Dumai masih buruk. Salah satu masalah utama adalah ruang parkir yang tidak cukup untuk menampung jumlah kendaraan yang terus meningkat setiap tahunnya. Faktor lain dari sumber daya manusia Dinas Perhubungan yang bertanggung jawab langsung atas pengelolaan parkir tidak sebanding dengan banyaknya juru parkir. Selain itu, peraturan karcis tidak memiliki sistem yang diatur yang digunakan. Juru parkir menurunkan kualitas parkir karena mengabaikan tanggung jawab utamanya.
9.	Aldy Zulian Saputra, Ida Hayu Dwimawanti & Tri Yuniningsih,	Tujuannya untuk menganalisis efektivitas	Nakamura dan Smallwood (dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan indikator pencapaian tujuan atau hasil, efisiensi,

No	Penulis, Judul, Jurnal & Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian & Metode Penelitian	Teori Penelitian	Hasil
	Analisis Efektivitas Program Teknologi Aplikasi E-Retribusi Pasar (Tape Pasar) Di Kota Surakarta, Journal of Public Policy and Management Review, 12(2), 2023: 611-620.	program Teknologi Aplikasi E-Retribusi Pasar (TAPE Pasar) di Kota Surakarta, serta menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat pada program Teknologi Aplikasi E-Retribusi Pasar (TAPE Pasar) di Kota Surakarta. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif.	Adhiyatmoko, 2015:21) memiliki pendapat yang berbeda terkait efektivitas program, yaitu: Pencapaian tujuan atau hasil, Efisiensi, Kepuasan kelompok sasaran, Daya tanggap klien, Sistem pemeliharaan.	kepuasan kelompok sasaran, daya tanggap klien, sistem pemeliharaan, Dinas Perdagangan Kota Surakarta dinilai kurang efektif karena ada masalah terus menerus pada indikator kepuasan kelompok sasaran. Kondisi lingkungan dan hubungan organisasi adalah faktor yang mendukung Dinas Perdagangan Kota Surakarta dalam penerapan teknologi TAPE Pasar (Market TAPE). Faktor yang menghambat pelaksanaan TAPE Pasar (Market TAPE) adalah sumber daya dan kemampuan pelatih.
10.	Erwin Gunawan, Lina Sunyata & Hairil Anwar, Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas,	Tujuannya untuk mengetahui seberapa efektif program keluarga harapan (PKH) di Desa Matang Terap. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif.	Budiani, 2007:53) yang terdiri dari ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program keluarga harapan (PKH) tidak efektif secara keseluruhan karena beberapa indikator belum dipenuhi sepenuhnya. Tidak tepatnya sasaran bagi penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) dapat dilihat dari fakta bahwa data kesejahteraan sosial tidak diperbarui secara berkala tiga bulan sekali. Sosialisasi program, di sisi lain, sudah efektif karena dapat memberikan pemahaman kepada keluarga penerima manfaat (KPM)

No	Penulis, Judul, Jurnal & Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian & Metode Penelitian	Teori Penelitian	Hasil
	Publika Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal), 11(3), 942-959. (2022).			rutin hanya satu bulan sekali. Tujuan program tidak menyimpang dari tujuan program. Pemantauan program tidak efektif dimana hanya fokus pada pertemuan kelompok saja dan pandemi juga menghambat pemantauan.

Penelitian terdahulu sebelumnya dijadikan acuan oleh peneliti yang memiliki kesamaan dalam penggunaan metode kualitatif. Selain itu, teori yang digunakan pada penelitian ini yang berfokus mengenai efektivitas parkir elektronik (*e-parking*). Penelitian ini memiliki perbedaan pada lokasi penelitian. Hasil sepuluh penelitian terdahulu menunjukkan bahwa adanya kekurangan serta hambatan dalam mengelola parkir untuk menambah Pendapatan Asli Daerahnya masing-masing. Kesadaran petugas maupun masyarakat terkait parkir masih sangat kurang sehingga hal ini menjadi sebuah gap dalam penelitian yang masih berkelanjutan sehingga perlu pengendalian atau eksplorasi lebih mendalam guna memahami dan mengembangkan konsep efektivitas dalam suatu program. Selain itu, kebaruan dalam penelitian ini yaitu pada objek efektivitas *e-parking* di tepi jalan umum dalam meningkatkan PAD menggunakan teori menurut Subagyo dalam Budiani (2007), ada empat indikator untuk menilai sejauh mana program tersebut efektif yang ditentukan berdasarkan: ketepatan program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program dan pemantauan program.

Sepuluh penelitian terdahulu sangat berkaitan mengenai topik yang akan diteliti oleh penulis meskipun ada jurnal yang memiliki lokus yang sama. Fokus dari penelitian terdahulu ini dapat menjadi pembelajaran dari kajian-kajian yang diteliti oleh para peneliti sebelumnya serta dapat menjadi sumber literatur utama untuk penelitian yang akan diteliti oleh penulis saat ini dengan judul “Efektivitas Program Parkir Elektronik (*E-parking*) di Tepi Jalan Umum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang”. Sehingga, penulis membuat tabel matriks penelitian terdahulu seperti yang dicantumkan di atas agar dapat mempermudah

pembaca dalam melihat referensi yang sesuai atau relevan dengan penelitian yang hendak diteliti oleh penulis.

1.5.2 Kajian Teori

1.5.2.1 Administrasi Publik

Konsep administrasi publik sudah ada lama dan tidak baru. Namun para ahli sering kali mengganti istilah administrasi publik dengan administrasi negara. Terdapat banyak variasi persepsi mengenai administrasi publik. Menurut John M. Pfiffner dan Robert V. Prethuis, administrasi publik adalah pelaksanaan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah melalui lembaga politik, yang bisa diartikan sebagai gabungan aktivitas manusia dan partai untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Kebanyakan dari mereka terkait dengan operasi pemerintah sehari-hari termasuk keterampilan organisasi dan multidisiplin yang memberikan petunjuk dan tujuan bagi banyak individu. Pemahaman administrasi publik menurut John M. Pfiffner dan Robert V. Prethuis mengacu pada implementasi kebijakan mengenai pengelolaan operasional pemerintahan ditentukan lembaga politik dimana tindakan pemerintah wajib bersifat politis. Proses kebijakan membutuhkan pembentukan lembaga perwakilan politik sebagai mekanisme utama pengambilan kebijakan yang efektif.

Definisi John M. Pfiffner dan Robert V. Prethuis serupa dengan definisi Barton dan Chappell (dalam Keban, 2011: 5), administrasi publik adalah suatu aktivitas pemerintahan, atau pekerjaan pemerintahan. Selain pandangan yang diungkapkan oleh Barton dan Chappell, definisi administrasi publik oleh Marshall Dimock, Gladys O. Dimock dan Louis W. Koenig (1960) (dalam Siafi, 2010: 25) juga

sependapat yang menjelaskan, administrasi publik merupakan cara pemerintah menjalankan kekuasaan politiknya. Administrasi publik menurut Marshall Dimock, Gladys O. Dimock dan Louis W. Koenig adalah lembaga pemerintah yang mempunyai kekuatan politik di suatu negara. Oleh karena itu, setelah menelaah ketiga topik yang disampaikan oleh para ahli berbeda, organisasi publik yang membahas tentang kerja pemerintah juga disarankan agar memuat proses politik.

Edward H. Litchfield (1956) (dalam Syafiie, 2010:25) menyatakan bahwa administrasi publik merupakan studi tentang cara mengorganisir lembaga pemerintahan, termasuk penyediaan staf, pendanaan, mobilisasi, dan kepemimpinan yang memerlukan sumber daya manusia dan dana serta harus terstruktur di bawah satu pemimpin. Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan Dwight Waldo dalam Pasolong (2007:8), yang menyatakan bahwa administrasi publik adalah pengelolaan dan pengorganisasian sumber daya manusia beserta perlengkapannya untuk mencapai tujuan pemerintahan. Chandler dan Plano juga memiliki pemikiran yang senada, (dalam Keban, 2014:3) administrasi publik didefinisikan sebagai proses mengorganisasikan sumber daya politik dan personil untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola keputusan dalam kebijakan publik. Maka setelah meninjau ketiga konsep sebelumnya, administrasi publik didefinisikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengkoordinasikan sumber daya yang terdapat dalam sebuah pemerintahan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro (dalam Syafiie, 2010: 24) “Administrasi publik merupakan usaha gabungan antar berbagai kelompok dalam

pemerintahan, yang mencakup tiga cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif karena memiliki peran penting di dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah. Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro menjelaskan bahwa kerjasama antara tiga cabang pemerintahan (eksekutif, legislatif, legislatif) dan sektor swasta menyoroti pentingnya pelayanan kepada masyarakat. Hal ini ditekankan karena pemerintah tidak bisa beroperasi secara independen, sehingga memerlukan kelompok lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut definisi David H. Rosenblum (dalam Pasolong, 2007: 8) mengatakan bahwa manajemen publik merupakan penggunaan metode, konsep dan metode manajemen politik dan hukum untuk mencapai kepentingan pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan. Hukum, manajemen dalam upaya memberikan pekerjaan dan pelayanan hukum kepada masyarakat pada umumnya atau pada bidang tertentu.

Sehubungan dengan pandangan Nicholas Henry (dalam Keban, 2014:6), administrasi publik berupaya untuk menginstitusikan praktik manajemen selaras dengan nilai-nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang lebih baik. Definisi tersebut disampaikan oleh Nicholas Henry menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan masih terkait dengan teori-teori seperti teori manajemen untuk mendukung kegiatan pemerintahan dapat berlangsung dengan efektif dan efisien, maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Sehingga ke 3 definisi di atas lebih menekankan pada proses manajemen dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan seperti pelayanan publik yang berguna bagi tercapainya tujuan suatu pemerintahan.

Berdasarkan pernyataan beberapa definisi administrasi publik menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik mencakup seluruh proses pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh sekelompok individu atau organisasi untuk menyediakan layanan kepada masyarakat dengan tujuan untuk melayani secara efektif dan efisien. Namun administrasi publik adalah ilmu yang terus berkembang seiring dengan kendala yang dihadapi. Pendapat para ahli juga memberikan wawasan mengenai peran dan tantangan yang dihadapi organisasi pemerintah dalam menyikapi berbagai permasalahan.

1.5.2.2 Paradigma Administrasi Publik

Perkembangan dari suatu ilmu pada dasarnya dapat diketahui melalui perubahan paradigma. Paradigma adalah pola pikir seseorang atau sekelompok orang (1970) (dalam Keban, 2014:31) melalui karyanya yang berjudul Struktur Revolusi Sains menawarkan pengertian pandangan paradigma. Sebuah nilai, makna, prinsip dasar, atau solusi untuk sebuah masalah yang diterima dari komunitas ilmiah pada periode tertentu. Menurut Robert T. Golembiewski (dalam Sugandi, 2011:10) pengembangan ilmu administrasi publik hendaknya menekankan fokus dan tempat. Tujuan dari lensa ini adalah untuk menunjukkan lokasi area studi, yang dengan sendirinya menunjukkan lokasi suatu area studi. Oleh karena itu, Głombiewski mencoba menyederhanakan gagasan ini melalui tingkat integrasi suatu model. Menurut gagasan Nicholas Henry (dalam Warsawa, 2020), menunjukkan lima prinsip dalam administrasi publik:.

Paradigma I (1900-1926) diketahui dengan nama paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Dalam buku "Politics and Administration", Frank J.

Goodnow dan Leonard D. White mengemukakan dua fungsi utama pemerintah yang saling berbeda, yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi. Fungsi politik terkait dengan pembuatan kebijakan pemerintah, sementara fungsi administrasi terkait dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Goodnow menekankan pentingnya birokrasi dalam paradigma ini, sementara metode atau cara dalam Administrasi Publik jarang dibahas secara rinci. Leonard D. White memberikan legitimasi akademik pada Administrasi Negara melalui karyanya "Pengantar Studi Administrasi Publik", di mana ia menekankan bahwa politik tidak boleh campur tangan dalam administrasi, dan administrasi negara wajib menjadi studi ilmiah yang tidak memihak nilai.

Paradigma II (1927-1937) yakni paradigma Prinsip Administrasi Publik. Paradigma kedua dalam Administrasi Publik dipengaruhi oleh manajemen klasik, di mana prinsip-prinsip administrasi menjadi fokus utama. Prinsip-prinsip itu tertuang menjadi POSDCORB atau Perencanaan, Pengorganisasian, Penempatan, Pengarahan, Koordinasi, Pelaporan, dan Penganggaran yang diterapkan di berbagai tempat sebab memiliki sifat umum, sementara itu lokus administrasi publik belum pernah terungkap dengan jelas sebab mereka menganggap prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dimanapun tidak terkecuali dalam organisasi pemerintah sehingga pada paradigma ini lebih ditekankan fokus dan lokus. Prinsip-prinsip ini diperkaya oleh kontribusi dari ahli manajemen seperti F.W. Taylor, Fayol, Gullick, dan Urwick.

Paradigma III (1950-1970) merupakan paradigma Administrasi Pulik dalam konteks Ilmu Politik. Herbert Simon mengkritik prinsip manajemen ilmiah

POSDCORB karena tidak menguraikan konsep "public" dalam "administrasi publik" dan tidak memberikan gambaran yang memadai mengenai tugas administrator publik, khususnya dalam pengambilan keputusan. Kritik Simon ini memicu perdebatan seputar dikotomi antara administrasi dan politik. Pandangan Morstein-Marx mengenai elemen administrasi publik menimbulkan pertanyaan kembali tentang pemisahan politik dan ekonomi, dianggap tidak realistis dan tidak mungkin. Fase ini ditandai dengan upaya untuk merekonsep ulang keterkaitan konseptual antara administrasi dan ilmu politik. Administrasi kembali berkembang dengan merujuk pada induk ilmunya, yaitu Ilmu Politik. Dampak dari hal tersebut perlu mengembangkan bidang ini dengan penekan pada keahliannya yang mendasar. Fase ini juga ditandai dengan perkembangan studi komparatif dan pengembangan administrasi sebagai bagian integral dari administrasi negara.

Paradigma IV (1956-1970) yaitu Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi. Pada paradigma keempat, istilah "Administrative Science" digunakan untuk menggambarkan isi dan fokus pembahasan. Fokus pada paradigma ini hanya menekankan pada prinsip-prinsip administrasi tanpa memperhatikan lokusnya. Paradigma ini menciptakan metode yang memerlukan keterampilan dan keahlian khusus. Namun, perkembangan paradigma keempat tidak terjadi tanpa kendala, karena muncul banyak pertanyaan yang perlu dijawab, seperti apakah ilmu administrasi memiliki hak untuk membahas aspek "public" dalam administrasi tersebut. Fase ini ditandai dengan upaya untuk merekonsep ulang keterkaitan konseptual antara administrasi dan ilmu politik. Administrasi kembali berkembang dengan merujuk pada induk ilmunya, yaitu Ilmu Politik. Dampaknya perlu

menyusun bidang ini sehubungan dengan fokus keahlian yang paling penting. Fase ini juga ditandai dengan perkembangan studi komparatif dan pembangunan administrasi sebagai komponen dari administrasi negara.

Paradigma V (1970-1990) adalah paradigma yang disebut sebagai Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik dengan titik inti yang jelas. Herbert Simon memperhatikan pentingnya pengembangan dua aspek dalam disiplin Administrasi Negara, yaitu pengembangan murni ilmu Administrasi Negara dan isu-isu kebijaksanaan publik. Administrasi Negara pada fase ini lebih berfokus pada bidang kebijaksanaan (ilmu politik) dan metode evaluasi dampak kebijakan. Fokusnya melibatkan teori organisasi, kebijakan publik, serta teknik administrasi atau manajemen yang telah berkembang. Sementara itu, lokusnya terletak pada masalah publik dan birokrasi pemerintahan. Paradigma keempat menciptakan metode yang membutuhkan spesialisasi dan keahlian, namun muncul banyak pertanyaan yang perlu dijawab, seperti apakah ilmu administrasi memiliki hak untuk membahas aspek "public" dalam administrasi tersebut.

Paradigma VI (1990-Sekarang) merupakan Governance Paradigm. George Frederickson mengembangkan paradigma ini sebagai pengembangan dari konsep administrasi publik Nicholas Henry. Paradigma governance, atau administrasi negara baru, menekankan upaya dalam mengorganisasikan, merancang, dan menciptakan organisasi yang bergerak menuju nilai-nilai kemanusiaan secara maksimal. Ini dicapai melalui pendekatan organisasi demokratis yang responsif dan desentralisasi mendorong partisipasi, serta menyediakan layanan secara merata kepada masyarakat. Menurut Frederickson, administrasi negara baru menentang

gagasan bahwa teori administrasi dan administrator harus bebas atau netral. Paradigma ini lebih fokus pada kebijaksanaan dan metode pengukuran hasil kebijakan. Penyesuaian politik dan administrasi dianggap penting untuk mencapai tujuan nilai-nilai yang diusung oleh paradigma administrasi negara baru ini.

Berdasarkan penjelasan tersebut, administrasi publik tidak hanya berfokus pada pemerintah tetapi juga pada masyarakat karena beberapa elemen penting ilmu administrasi publik terkait dengan pemerintah dan masyarakat. Paradigma keenam menunjukkan bahwa program parkir elektronik (*e-parking*) melalui kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat. Kerjasama ini akan meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir dan transparansi penggunaan dana retribusi. Sistem parkir elektronik (*e-parking*) di tepi jalan umum mencatat setiap transaksi secara elektronik sehingga mengurangi potensi kebocoran pendapatan dan memastikan bahwa setiap pembayaran parkir tercatat dengan baik.

1.5.2.3 Kebijakan Publik

Kebijakan menunjuk kepada serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan. Kebijakan mengacu pada serangkaian aktivitas yang disebabkan oleh proses yang melibatkan hubungan organisasi dan peran agen kebijakan (Handoyo, 2012: 21). Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt dalam Mutofiah (2020: 11) kebijakan merupakan keputusan yang bersifat tetap dan ditandai oleh adanya struktur dan pengulangan perilaku dari pengambil keputusan dan orang yang patuh pada keputusan tersebut. Kebijakan publik merupakan aktivitas yang dilakukan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Pembuatan suatu

kebijakan dapat dilakukan secara sengaja dengan keinginan mewujudkan suatu tujuan tertentu. Sebagai suatu disiplin ilmu, kebijakan publik merupakan suatu ilmu yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga perlu disiplin ilmu lain seperti ilmu politik, ekonomi, sosiologi, dan psikologi. Islamy dalam Anggara (2016) memberikan pandangan bahwa kebijakan merupakan suatu rangkaian berupa tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah, baik yang dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan. Sebagai suatu disiplin ilmu kebijakan sendiri tercipta melalui perundang-undangan.

Menurut Riant Nugroho dalam Fitriani (2020: 18) kebijakan publik adalah suatu keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai sebuah langkah untuk mewujudkan tujuan negara. Adapun kebijakan publik menurut Easton dalam Thoha (2002: 65) dirumuskan sebagai suatu alokasi nilai yang bersifat otoritatif kepada seluruh masyarakat. Jadi dalam pengertian ini kebijakan bertindak sebagai pengatur masyarakat dimana isi yang ada didalamnya bersifat memaksa. Pelaku yang bersifat otoritatif hanya dilakukan oleh pemerintah, dimana hal yang harus dilaksanakan atau tidaknya bergantung pada pemerintah itu sendiri. Hogwood dan Gunn dalam Indiahono (2017: 13) membagi kebijakan menjadi 10 artian:

- 1) Sebagai label untuk sebuah bidang kegiatan
- 2) Sebagai ungkapan tujuan umum atau kegiatan negara yang diinginkan
- 3) Sebagai proposal spesifik
- 4) Sebagai keputusan pemerintah
- 5) Sebagai otorisasi formal
- 6) Sebagai sebuah program

- 7) Sebagai output
- 8) Sebagai sebuah hasil (outcome)
- 9) Sebagai teori dan model
- 10) Sebagai sebuah proses

Keban dalam Tahir (2015: 32) memberi pengertian kebijakan publik menjadi tiga bagian, pertama yakni sebagai produk dimana sebuah kebijakan didefinisikan sebagai kumpulan saran atau kesimpulan. Kedua yakni sebagai langkah-langkah aturan yang dapat digunakan organisasi untuk menemukan harapan. Ketiga yakni sebagai kerangka kerja dimana adalah proses negosiasi untuk merundingkan masalah dan metode penerapannya.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik sebagai suatu produk berbentuk rangkaian aktivitas yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan serta memecahkan permasalahan yang dialami masyarakat dimana dalam pelaksanaannya bersifat untuk dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Riant Nugroho dalam Fitriani (2020: 18) kebijakan merupakan keputusan pemerintah sebagai langkah mewujudkan tujuan negara, maka relevansi teori kebijakan publik terhadap fokus yang diambil peneliti yakni terkait dengan pemenuhan tujuan dalam bidang parkir, maka pemerintah mencetuskan sebuah kebijakan dalam bentuk prgram yaitu Program Parkir Elektronik (*E-parking*) di tepi jalan umum.

1.5.2.4 Efektivitas Program

Efektivitas diartikan sebagai level dimana tujuan tercapai dan sasaran organisasi. Efektivitas pada dasarnya merupakan ruang lingkup sasaran kegiatan organisasi. Kata efektif berasal dari kata “efektif” yang berarti “sukses atau kerja yang berkualitas”. Leksikon ilmiah umum menunjukkan efektif jika digunakan dengan benar, dan penggunaan atau dukungan subjek akan muncul. Efektivitas adalah kunci untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan dalam suatu organisasi, kegiatan atau proyek. Dianggap efektif ketika tujuan dan sasaran tercapai. Sondang P. Siagian (2001: 24) mengatakan bahwa efektivitas penggunaan bahan sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya, sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya dengan lebih efisien. Efektivitas mencerminkan tingkat keberhasilan dalam kaitannya dengan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Jika hasil tindakannya lebih dekat dengan target, berarti usahanya lebih besar.

Jika berbicara efisiensi sebagai suatu kegiatan, maka fokusnya mencapai berbagai tujuan yang ditetapkan secara bertahap dengan memanfaatkan sumber daya tertentu yang harus ditentukan terlebih dahulu dan penggunaan sumber daya tersebut harus mencapai hasil tertentu pada waktu yang telah ditentukan (S. P Siagian 2005: 171). Organisasi melibatkan banyak individu yang berinteraksi secara dinamis. Interaksi ini dapat diatur dalam suatu kerangka yang mendukung pencapaian tujuan yang sama. Meskipun setiap organisasi mempunyai tujuan masing-masing, dan setiap orang yang bergabung dalam organisasi berharap dapat membantunya mencapai tujuan selain tujuan tim.

Efektivitas sering digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi. Untuk mencapai prestasi pelaksanaan pekerjaan dalam organisasi, terlibat tidak hanya sekelompok orang namun juga alat-alat seperti mesin, cara kerja, waktu, bahan dan sumber daya. Semua organisasi menginginkan untuk mendorong kinerja dan menggunakan sumber daya ini semaksimal mungkin. Oleh karena itu perlu adanya pengendalian, pengarahan dan pemanfaatan. Tindakan mengelola dan mengelola sumber daya, manusia, dan peralatan ini disebut manajemen. Dikatakan terkelola dengan baik apabila dalam pengelolaannya tidak terdapat kelemahan. Manfaat model dasar ini adalah memberikan panduan yang berguna bagi para manajer untuk analisis serta pengembangan. Ketika standar yang efektif tidak ditentukan atau disepakati, program tersebut dapat mengalami kegagalan sehingga penting untuk mengembangkan strategi pengembangan organisasi secara sistematis. Konsep sistem dan dimensi waktu menentukan kinerja organisasi yang dianggap sebagai bagian dari suatu sistem (lingkungan) yang lebih besar berdasarkan teori sistem, organisasi perlu memiliki sumber daya yang beragam pada waktu yang berbeda, terus bekerja, dan akhirnya menjadi suatu produk yang akhirnya dikembalikan ke alam.

Efektivitas organisasi mencakup efektivitas individu dan tim. Efektivitas individu meningkatkan kinerja anggota staf atau karyawan organisasi. Karyawan atau staf dalam organisasi diberi tugas. Pekerjaan yang baik diketahui dengan melakukan. Efektivitas tim adalah kontribusi total seluruh anggota. Terkadang, kontribusi tim lebih efektif daripada kontribusi individu. Salah satu cara untuk mengukur efektivitas organisasi adalah dengan menilai seberapa baik hubungannya

dengan lingkungannya. Kenyataannya, organisasi bisa dinyatakan menguntungkan (hubungan berkelanjutan dengan lingkungan hidup), namun tidak (penuh pemborosan internal). Menurut Richard, m Street dalam Purnomo (2006:37) menunjukkan bahwa efektivitas organisasi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu:

- a. Karakteristik organisasi mencakup struktur organisasi dan struktur teknis, yaitu cara organisasi mengelola individu untuk menciptakan organisasi
- b. Karakteristik lingkungan mencapai dua aspek yang saling berhubungan yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan ekstern yaitu semua lingkungan kekuatan yang timbul diluar batasan-batasan organisasi. Lingkungan intern pada umumnya dikenal sebagai iklim organisasi yang meliputi bermacam-macam atribut-atribut lingkungan saja.
- c. Karakteristik lingkungan dalam berdampak langsung pada rasa ketertarikan pada organisasi dan prestasi kerja.
- d. Kebijakan dan prosedur diperlukan bagi organisasi untuk mencapai keberhasilan dengan merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan kegiatan yang direncanakan.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini merupakan salah satu faktor yang menentukan apakah akan mengubah sifat manajemen dan pengelolaan. Efisiensi dalam konteks ini adalah tercapainya tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada, baik untuk input, proses maupun output. Sumber daya dalam hal ini meliputi ketersediaan personel, fasilitas dan infrastruktur, serta metode dan pendekatan yang digunakan. Suatu pekerjaan dinyatakan menguntungkan jika dilakukan dengan baik

dan diikuti praktek manajemennya, dan suatu pekerjaan dikatakan menguntungkan jika dilakukan dengan benar dan efisien. Oleh karena itu, suatu fungsi organisasi dikatakan efektif apabila suatu fungsi manajemen dijalankan sesuai prosedur atau sesuai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi.

Mengukur efektivitas sebuah program kegiatan bukanlah hal yang mudah, karena efektivitas dilihat dari berbagai perspektif dan bergantung pada penilaian serta interpretasinya. Jika dilihat berdasarkan sudut pandang produktivitas, manajer produksi memahami bahwa profitabilitas merujuk pada kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Rencana yang telah ditetapkan dan hasil yang telah dicapai dapat dibandingkan untuk mengukur tingkat efektivitas. Sementara itu usaha dianggap efektif jika hasil atau usaha yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau tujuan tidak tercapai maka dianggap kurang efektif. Kriteria yang berkaitan dengan tercapai atau tidak tercapainya tujuan, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya pegawai dapat melaksanakan pekerjaannya guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi
- b. Kejelasan strategi untuk mencapai tujuan, strategi adalah suatu "jalan" yang ditempuh melalui berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan agar pengelola tidak kehilangan waktu dalam mencapai tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang kuat terkait dengan tujuan dan strategi yang dapat dicapai, sehingga kebijakan dapat mencapai tujuan dengan mencoba mengambil alih administrasi. Proses analisis dan desain kebijakan harus kuat sehingga kebijakan dapat menjembatani tujuan dan mampu

menyelesaikan tugas administratif.

- d. Perencanaan yang matang, berarti keputusan dibuat sekarang oleh organisasi di masa yang akan datang.
- e. Perencanaan yang sesuai dengan rencana yang baik harus selalu dilakukan, karena tanpa pedoman yg jelas, para pelaksana tidak memiliki pedoman apa pun tentang yang perlu diambil dan langkah-langkah yang harus dilakukan.
- f. Salah satu indikator organisasi yang baik adalah ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Hal ini menunjukkan kemampuan organisasi untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ada.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, apapun rencana yang dibuat, jika tidak dilaksanakan dengan efektif dan efisien, organisasi tidak akan mencapai tujuannya. Oleh karena itu, implementasi yang baik sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka diperlukan sistem pemantauan dan pengendalian untuk mengendalikan efektivitas organisasi.

Kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu: a) Produktivitas, b) Kemampuan adaptasi kerja, c) Kepuasan kerja, d) Kemampuan berlaba, & Pencarian sumber daya. Sedangkan Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- a. Pencapaian tujuan mencakup seluruh upaya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan tahapan-tahapan yang jelas untuk menjamin pencapaian tujuan akhir, baik dalam hal pencapaian bagian-bagiannya

maupun dalam hal periode waktu yang ditentukan. Beberapa aktor memiliki tanggung jawab dalam pencapaian tujuan, termasuk menetapkan kurun waktu dan sasaran yang menjadi target konkrit

- b. Integrasi adalah ukuran seberapa baik suatu organisasi dapat bersosialisasi, membuat konsensus, dan berkomunikasi dengan organisasi lain.
- c. Adaptasi adalah ukuran seberapa baik organisasi dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk mencapai tujuan ini, tolak ukur digunakan dalam proses pengadaan dan pengambilan tenaga kerja.

Dalam mengetahui seberapa efektif suatu tindakan, pendekatan efektivitas digunakan Matini & Lubis (1987: 56) menyatakan bahwa ada banyak cara untuk mengukur efektivitas organisasi:

a. Pendekatan sasaran (Goal Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Pendekatan sasaran untuk mengukur efektivitas dimulai dengan menentukan tujuan organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut. Ketika mengukur efektivitas, tujuan utama harus dipertimbangkan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi " Official Goal" dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu

pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif.

b. Pendekatan Sumber (System Resource Approach)

Pendekatan sumber menentukan seberapa efektif suatu organisasi dalam memperoleh sumber daya yang diperlukan. Organisasi harus memiliki kemampuan untuk memperoleh dan memelihara berbagai sumber daya secara efisien. Pendekatan ini didasarkan teori mengenai sistem bangunan harus terbuka terhadap lingkungannya. Ini karena universitas memiliki hubungan yang sama dengan lingkungannya, meskipun sumber daya lingkungannya terbatas dan berharga. Pendekatan sumber dilihat dari seberapa erat hubungan anggota binaan program usaha dengan lingkungannya dalam mencari sumber untuk mencapai tujuan dalam kegiatan usaha organisasi.

c. Pendekatan Proses (Internal Process Approach)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu organisasi internal. Pada organisasi yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki organisasi, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan organisasi.

Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program. Efektivitas program dapat diketahui dengan

membandingkan tujuan program dengan output program (Ditjen Binlantas Depnaker, 1983, dalam Setiawan, 1998). Sementara itu pendapat peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Hal tersebut dinyatakan oleh Kerkpatrick yang dikutip oleh Cascio (1995) bahwa evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan dapat dilakukan, diantaranya melalui reaksi peserta terhadap program yang diikuti. Subagyo dalam Budiani (2007: 53) dalam mengukur suatu efektivitas program dilihat berdasarkan:

- 1) Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
- 2) Sosialisasi program yaitu kemampuan penyelenggara program untuk menyebarkan informasi tentang pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
- 3) Pencapaian tujuan program yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 4) Pemantauan program yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Menurut Sutrisno dalam Wulandari (2018:16) ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan untuk mengetahui sejauh mana keefektifan sebuah program atau suatu kegiatan diantaranya:

1) Pemahaman Program

Pada indikator ini pemahaman program yang dimaksudkan adalah bagaimana suatu program direalisasikan sehingga dapat dengan mudah diterima dan

dipahami. Hal ini dimaksudkan ketika program dijalankan dapat dengan mudah dan efektif dalam proses pelaksanaannya. Pihak yang perlu memahami program ini adalah semua pihak yang terlibat dalam proses kegiatan program tersebut.

2) Ketepatan Sasaran

Sasaran dibahas pada indikator ini merupakan hal yang perlu ditinjau langsung akan keberadaan program. Karena keberadaan program yang dirancang apakah sudah tepat sasaran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu program dapat dikatakan efektif apabila program sesuai dengan sasaran yang telah dilakukan sejak awal.

3) Ketepatan Waktu

Indikator selanjutnya adalah ketepatan waktu, waktu merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses kehidupan. Ketepatan waktu dalam hal ini suatu program dikatakan efektif apabila pelaksanaan program sesuai dengan aturan waktu. Semakin tepat pada saat pelaksanaan program maka semakin efektif program dapat terealisasi.

4) Tercapainya Tujuan

Pada indikator ini menilai tingkat keefektifan suatu program dengan mengetahui bagaimana tujuan yang telah ditetapkan sejak awal dapat dicapai. Tercapainya tujuan pada program pemberdayaan masyarakat dilihat dari sejauh mana beberapa tujuan yang sudah menjadi aturan sejak awal program ini dapat tercapai. Semakin banyak memberikan manfaat dapat dikatakan efektif apabila tujuan telah tercapai.

5) Perubahan Nyata

Mengukur keefektifan dengan memberikan perubahan nyata, dimaksudkan bahwa aturan yang telah ditetapkan sejak awal dapat direalisasikan dengan baik sesuai dengan rencana.

Menurut Campbell J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

- 1) Keberhasilan program
- 2) Keberhasilan sasaran
- 3) Kepuasan terhadap program
- 4) Tingkat input dan output
- 5) Pencapaian tujuan menyeluruh (Cambel, 1989:121)

Epstein dalam Dharma (2004: 131) menyatakan bahwa dalam mengukur efektivitas dari suatu program dapat dilihat melalui:

- 1) Kebutuhan masyarakat secara implisit dapat dikontrol.
- 2) Adanya program layanan khusus untuk pemenuhan keperluan masyarakat.
- 3) Mengukur kualitas pelayanan pemerintah khususnya dalam kaitannya dengan ukuran persepsi dan kepuasan masyarakat.
- 4) Pemberi layanan diharap mampu beradaptasi dengan persoalan yang dialami masyarakat.

Dari pendapat ahli yang telah dikemukakan diatas, maka efektivitas program adalah ukuran dari program atau kebijakan pemerintah yang dilaksanakan di masyarakat, yang diukur dengan beberapa indikator yang menunjukkan apakah program tersebut berhasil. Perencanaan dan partisipasi masyarakat adalah beberapa faktor yang menentukan keberhasilan program. Jadi, untuk menentukan seberapa

efektif suatu program, kita dapat mengambil teori efektivitas program. Dari beberapa indikator tentang efektivitas program yang telah disebutkan di atas, penulis penelitian ini menggunakan teori Subagyo dalam Budiani (2007), yang menyatakan bahwa ada empat prinsip yang digunakan untuk mengukur efektivitas program: ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan.

Starman dalam Kunarjo (2002: 126) menyatakan bahwa tidak dapat dipungkiri pandangan akan efektivitas suatu program perlu adanya faktor pendukung terselenggaranya program tersebut agar mampu berjalan sesuai dengan waktu dan sasaran serta bermutu. Faktor tersebut berupa:

- 1) Peranan pendamping, berarti membantu kelompok sasaran dalam memperkuat internal organisasi dengan mematangkan organisasi, membantu menemukan berbagai kemungkinan atau potensi lingkungan, dan berfungsi sebagai jembatan antara kelompok sasaran dan potensi dari luar.
- 2) Partisipasi masyarakat yang diukur melalui kontak dengan kelompok sasaran serta partisipasi aktif dalam proses perencanaan hingga penilaian program.
- 3) Kemampuan kelompok sasaran, yang akan menikmati hasil program, sumber-sumber yang dimiliki oleh masyarakat.

Sumber daya yang terbatas, struktur organisasi yang buruk, dan komitmen pelaksana yang rendah adalah masalah yang menghambat kinerja program, menurut Bardach dalam Tarigian (2007: 25). Menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam Mutiarin Dyah dan Zaenudin Arif (2014:98-99), ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu program adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi lingkungan adalah sistem lingkungan yang dapat mempengaruhi keberhasilan program dari perspektif sosiokultural, peran, dan penerima.
- 2) Sumber daya yaitu sumber pendukung baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya non manusia pada pelaksanaan program. Menurut Van Mener dan Van Horn (dalam zaenal, 2017) sumber daya terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial.
- 3) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana yaitu keterlibatan sumber daya dalam pelaksanaan program sehingga perlu adanya kompetensi dan kemampuan dalam bidang tertentu untuk mencapai tujuan program.

Menurut Subarso (2005: 90-92) ada empat faktor pendorong dan penghambat, sebagaimana dikutip dari pendapat Edward III:

- 1) Komunikasi

Komunikasi yang efektif sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan. Implementor harus memahami tujuan, sasaran, dan tugas kebijakan dengan jelas. Jika tujuan dan sasaran kebijakan tidak didefinisikan dengan baik atau tidak disampaikan secara jelas kepada pihak yang terlibat, mungkin akan ada resistensi dari kelompok sasaran.

- 2) Sumberdaya

Meskipun komunikasi kebijakan telah dilakukan, kekurangan sumberdaya untuk pelaksanaannya dapat menghambat efektivitas pelaksanaannya. Sumberdaya ini mencakup keterampilan implementor dan aspek finansial yang diperlukan.

- 3) Disposisi

Disposisi merujuk pada karakter dan sifat yang dimiliki oleh implementor, seperti tingkat komitmen, integritas, dan pendekatan demokratis. Jika implementor memiliki disposisi yang positif, kemungkinan besar ia akan melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuannya. Namun, jika implementor memiliki pandangan atau disposisi yang tidak mendukung tujuan kebijakan, implementasi menjadi kurang efektif.

4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap proses implementasi. Salah satu aspek kunci dalam struktur ini adalah adanya fragmentasi atau pembagian tanggung jawab (fragmentasi) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai panduan bagi implementor dalam menjalankan tugasnya.

1.5.2.5 Parkir Elektronik (*E-parking*)

Situs resmi e-parking (*eparkir.id*) menjelaskan bahwa e-parking adalah solusi elektronik untuk mengelola retribusi parkir untuk pemerintah daerah. Sistem ini menggunakan teknologi informasi untuk mengatasi permasalahan dalam layanan parkir kendaraan di sektor pemerintahan. Parkir elektronik (*e-parking*) merupakan sistem parkir elektronik yang menggunakan meteran, menggunakan mekanisme komputer real-time, dan mendukung pembayaran dengan kartu uang elektronik (e-money). Pendekatan ini, seperti disebutkan dalam keterangan Qohar (2018:44), menunjukkan penggunaan tombol yang dikendalikan oleh perangkat lunak atau telah terprogram.

Program *e-parking* merupakan upaya pemerintah untuk memberikan

pelayanan publik yang lebih baik dengan menggunakan kemajuan teknologi sebagai bagian dari visi menuju smart city (Artamalia & Prabawati, 2019). Inovasi *e-parking* diharapkan dapat mengurangi praktik parkir liar dan berpotensi mengurangi pelanggaran. Pembayaran parkir elektronik dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi dompet digital yang tersedia di smartphone. Sistem pembayaran *e-parking* juga mendukung variasi metode, termasuk *e-wallet*, QRIS, dan layanan perbankan melalui ponsel. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kota yang lebih aman, nyaman, dan mudah dikelola melalui penerapan program berbasis teknologi (Suherman, 2020).

Efektivitas *e-parking* umumnya dilatarbelakangi oleh keterbatasan jumlah ruang parkir yang tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang berkembang, rendahnya pendapatan daerah dari biaya parkir akibat kebocoran dan pungutan liar oleh juru parkir ilegal. Selain itu, tujuan lain dari penerapan *e-parking* adalah untuk melakukan penataan sistem parkir serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena sistem ini menggunakan tarif progresif yang dihitung per jam dan memiliki pengelolaan yang lebih transparan (Astuti, Dewi, & Julianto, 2019). *E-parking* dapat dianggap sebagai pengganti sistem parkir konvensional dengan sistem parkir elektronik dengan tujuan meningkatkan layanan masyarakat dan pengelolaan parkir secara keseluruhan.

Peraturan Walikota Semarang No. 70 Tahun 2021 mengatur penataan parkir di tepi jalan umum. Sistem parkir *e-parking* diperlukan untuk meningkatkan pelayanan parkir tepi jalan umum dan membuat lalu lintas aman, lancar, dan tertib. Selain itu, sistem ini bertujuan untuk mencegah praktik liar yang selama ini

dikeluhkan masyarakat dan mengurangi pendapatan daerah yang berasal dari parkir. Adanya *e-parking* memiliki keuntungan yang dimana kinerja petugas dapat dipantau secara online oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang dan lebih transparansi pendapatan parkir (Wahyudin, 2023).

1.5.2.6 Retribusi Parkir

Retribusi parkir termasuk dalam objek pajak daerah, sehingga tempat parkir tidak selalu terkena pajak daerah. Dengan kata lain, tempat parkir ini sudah diizinkan, atau disediakan khusus untuk kepentingan individu atau badan. Orang-orang yang menggunakan jasa parkir yang dikelola pemerintah membayar biaya parkir. Memperkuat penyediaan layanan pemerintah dan meningkatkan otonomi daerah adalah tujuan retribusi parkir. Retribusi parkir akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas dan layanan.

Retribusi parkir tidak selalu dikenakan pajak daerah karena ada tempat parkir yang sebagai objek retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk membayar jasa atau izin tertentu yang diberikan khusus untuk kepentingan individu atau organisasi. Retribusi parkir di tepi jalan umum berarti menyediakan layanan parkir di tepi jalan umum. Ini berarti bahwa pemerintah daerah mengatur penggunaan jalan umum yang digunakan sebagai tempat parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Subjek retribusi ini adalah individu atau organisasi yang menggunakan layanan parkir. Di bidang pemungutan retribusi parkir, terdapat berbagai macam undang-undang yang mengatur apa saja yang dapat dipungut oleh pemerintah dan bagaimana pembayarannya dapat dilakukan. Retribusi parkir merupakan salah satu jenis

retribusi yang diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum mengatur biaya parkir. Dengan mempertimbangkan persyaratan tersebut, retribusi tidak lain merupakan pemasukan yang berasal dari upaya pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan individu, badan, dan korporasi. Dengan demikian, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah. Pajak parkir dan biaya parkir adalah dua jenis pendapatan asli daerah dari tempat parkir. Pajak parkir adalah biaya yang dikenakan kepada penyedia parkir di luar jalan. Pengusaha parkir dapat mengelola parkir di gedung atau pelataran swasta atau pemerintah. Sebaliknya, biaya parkir adalah biaya untuk layanan parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi parkir terdiri dari dua kategori. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah biaya untuk layanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah. Retribusi tempat khusus parkir adalah biaya untuk layanan tempat khusus parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Dalam penelitian tentang keuangan daerah Pemerintah Kota Malang, Susilo dan Halim (2002:49) menganalisis masalah dalam penerimaan sumber-sumber keuangan daerah dari sumber-sumber yang dapat mempengaruhi PAD yang dapat diterima oleh pemerintah daerah. Ketidakefektifan pajak dan retribusi daerah disebabkan oleh tiga faktor: a) Penerimaan target belum tercapai; b) Tingkat kebocoran atau kelolosan yang masih tinggi; dan c) Penerimaan yang belum

optimal.

1.5.2.7 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Widjaja (2007: 78), salah satu sumber pendapatan adalah pendapatan asli daerah (PAD), yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu daerah. PAD terdiri dari pajak, retribusi, keuntungan perusahaan milik daerah, keuntungan pengelolaan kekayaan daerah (misalnya, keuntungan dari saham dan pinjaman) dan pendapatan asli daerah yang sah (misalnya, keuntungan dari penjualan aset tetap dan jasa giro). Menurut Pasal 1 Ayat 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh undang-undang. Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah, belum cukup memberikan kontribusi untuk pertumbuhan daerah. Akibatnya, pemerintah daerah harus meningkatkan PAD, khususnya dari sumber pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang berasal dari hasil pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah. Tujuan PAD adalah untuk memberi daerah kemampuan untuk menggali pendanaan untuk melaksanakan otonomi daerah sebagai bagian dari asas desentralisasi (Penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Berikut sumber-sumber PAD berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai berikut:

- a. Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum politik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
- b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifat budgetet airnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah yang mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah di suatu bidang tertentu.

1.5.2.8 Efektivitas Program *E-parking* di Tepi Jalan Umum Kota Semarang

Efektivitas program digunakan untuk menilai suatu program terlaksana dengan efektif guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas program parkir elektronik (*e-parking*) di tepi jalan umum berarti menilai program parkir elektronik (*e-parking*) di tepi jalan umum terlaksana sesuai dengan target program yang telah diputuskan. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas program parkir elektronik (*e-parking*) di tepi jalan umum adalah menurut Subagyo dalam Budiani (2007) yang berisikan tentang indikator ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program. Pemilihan ukuran ini disebabkan ukuran yang dikemukakan oleh Budiani terdapat empat indikator dimana masing-masing indikator dapat digunakan untuk menilai efektivitas program dengan lebih dalam yang dilihat berdasarkan perencanaan, pelaksanaan serta output dari program parkir elektronik (*e-parking*) di tepi jalan umum. Adapun penjelasan dari setiap fenomena sebagai berikut:

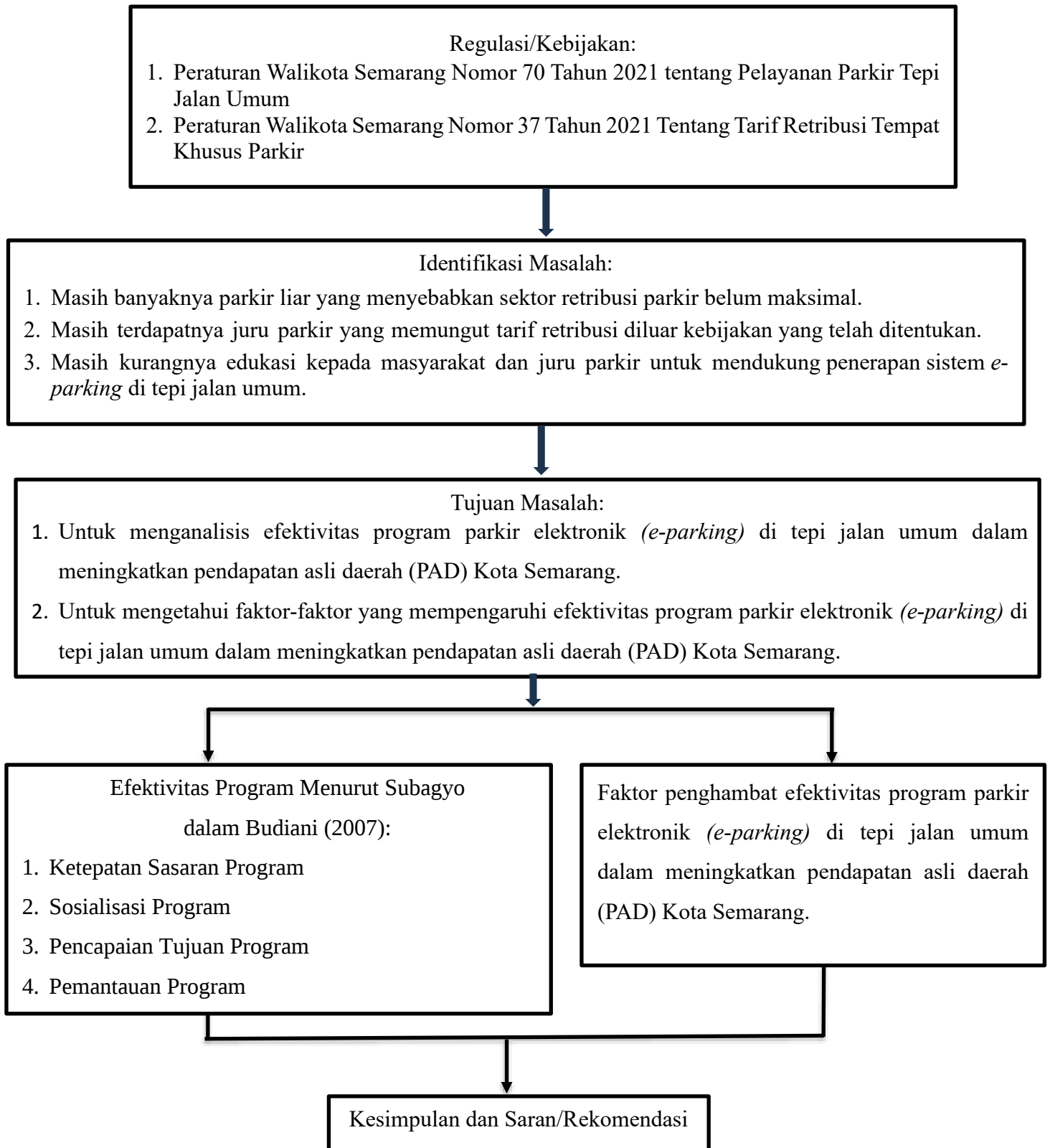
- 1) Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam mengukur ketepatan sasaran program *e-parking* di tepi jalan umum Kota Semarang peneliti akan melihat kriteria sasaran yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, sasarannya adalah masyarakat pengguna layanan, juru parkir, dan Dinas Perhubungan.
- 2) Sosialisasi program adalah kemampuan penyelenggara program dalam menyampaikan informasi pelaksanaan program kepada masyarakat secara umum serta sasaran program pada khususnya. Mengukur efektivitas dalam sosialisasi program dilihat bagaimana sosialisasi mengenai pembinaan dan pelatihan terhadap juru parkir dan masyarakat. Dalam upaya sosialisasi harus menggunakan komunikasi yang baik sehingga masyarakat dan juru parkir dapat menerima dan memahami apa yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang.
- 3) Pencapaian tujuan program yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam mengetahui pencapaian tujuan program dari program parkir elektronik (*e-parking*) di tepi jalan umum Kota Semarang, maka peneliti akan mengevaluasi tujuan program *e-parking* dalam memberikan pedoman dan mengatur pelayanan transportasi yang terdiri menjadi tiga yaitu: pelayanan parkir, sistem pelayanan dan alokasi pendapatan retribusi.
- 4) Pemantauan program yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Pemantauan

program sangat diperlukan untuk mengetahui permasalahan apa saja yang terjadi agar diminimalisir dengan melakukan perbaikan dan perencanaan yang lebih matang kedepannya agar program tersebut lebih efektif. Pemantauan program bentuk perhatian pelaksana program kepada peserta program yang bertujuan untuk memastikan program berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang diharapkan kepada penerima program *e-parking*. Dengan melakukan pemantauan secara teratur, pihak terkait dapat mengidentifikasi permasalahan yang mungkin muncul dan mengambil tindakan atau perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program *e-parking*.

1.6 Kerangka Berpikir

Berdasarkan dari indikator penelitian ini yaitu, maka penulis menguraikan alur kerangka pemikiran dengan mendudukan empat indikator efektivitas program yang ada menurut Subagyo dalam Budiani (2007), indikator-indikator dapat diterapkan untuk mengukur efektivitas program terdiri dari: ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, pemantauan program. Gambar berikut menunjukkan penjelasan efektivitas program yang lebih jelas:

Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran



1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Efektivitas Program *E-parking* di Tepi Jalan Umum Kota Semarang

Efektivitas program *e-parking* di tepi jalan umum Kota Semarang menilai program yang dilaksanakan apakah sesuai dengan target yang telah dibuat atau tidak. Saat mengukur efektif atau tidaknya program *e-parking* di tepi jalan umum Kota Semarang diukur melalui:

1. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran merupakan salah satu faktor utama dalam menilai sejauh mana program dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks program *e-parking* di tepi jalan umum, ketepatan sasaran dapat dilihat dari sejauh mana implementasi sistem parkir berbasis elektronik ini berhasil menyasar pengguna parkir yang sesuai dengan target, serta apakah program ini berkontribusi secara optimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Semarang. Dalam menilai ketepatan sasaran program *e-parking* di tepi jalan umum dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Semarang dapat dilihat dari gejala yang diamati sebagai berikut:

- a. Masyarakat pengguna layanan parkir dilihat dari adanya struk atau bukti pembayaran saat melakukan transaksi.
- b. Dinas Perhubungan dilihat dari ketepatan surat penugasan resmi dari Kepala Bidang Parkir.
- c. Juru parkir dilihat dari kepemilikan surat penugasan resmi dari Dinas Perhubungan.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program *e-parking* dapat dilihat dari penyelenggara program menyebarluaskan informasi mengenai cara penggunaannya dan manfaat adanya program *e-parking* ini kepada masyarakat. Maka dari itu penting untuk mengevaluasi sejauh mana penyampaian informasi tersebut efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan sistem parkir elektronik. Dalam menilai sosialisasi program *e-parking* di tepi jalan umum dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Semarang dapat dilihat dari gejala yang diamati sebagai berikut:

- a. Penyampaian informasi mengenai program *e-parking*

3. Pencapaian Tujuan Program

Dalam mengetahui tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, maka peneliti akan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah penerapan program *e-parking* di tepi jalan umum. Dengan menganalisis perbedaan tersebut, peneliti dapat menilai sejauh mana program ini berhasil mencapai tujuan yang diharapkan, baik dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) maupun efektivitas sistem parkir yang lebih efisien. Dalam menilai pencapaian tujuan program *e-parking* di tepi jalan umum dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Semarang dapat dilihat dari gejala yang diamati sebagai berikut:

- a. Pelayanan parkir dilihat penerapan sistem elektronik di lokasi tertentu.
- b. Sistem pelayanan dilihat dari kelancaran penggunaan sistem *e-parking*.

- c. Alokasi pendapatan retribusi dilihat dari transparansi penggunaan pendapatan retribusi untuk pemeliharaan dan pengembangan fasilitas parkir.

4. Pemantauan Program

Pemantauan yang efektif merupakan salah satu faktor kunci dalam menilai keberhasilan implementasi suatu program. Dalam konteks program *e-parking* di tepi jalan umum, pemantauan dapat dilihat dari sejauh mana sistem pengawasan yang diterapkan dapat mendeteksi dan mengatasi masalah yang muncul, serta memastikan kelancaran operasional program. Dalam menilai pencapaian pemantauan program *e-parking* di tepi jalan umum dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Semarang dapat dilihat dari gejala yang diamati sebagai berikut:

- a. Proses pemantauan yang berkelanjutan.
- b. Pelaksanaan evaluasi dalam mencapai tujuan.

1.7.2 Faktor Penghambat Efektivitas Program *E-parking* Kota Semarang

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan ditelusuri berdasarkan temuan saat lapangan berlangsung, sehingga dapat mengetahui dalam pelaksanaan program apakah terdapat faktor penghambat suatu efektivitas program atau tidak sesuai dengan permasalahan dan topik yang diangkat yaitu “Efektivitas Program *E-parking* di Tepi Jalan Umum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang”.

Tabel 1.6

Fenomena Penelitian

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Yang Diamati	Interview Guide
Efektivitas program <i>e-parking</i> di tepi jalan umum dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang	Ketepatan sasaran program	1. Masyarakat pengguna layanan parkir dilihat dari adanya struk atau bukti pembayaran saat melakukan transaksi. 2. Dinas Perhubungan dilihat dari ketepatan surat penugasan resmi dari Kepala Bidang Parkir. 3. Juru parkir dilihat dari kepemilikan surat penugasan resmi dari Dinas Perhubungan.	1. Bagaimana cara pengguna parkir mendapatkan pelayanan dalam program <i>e-parking</i>? 2. Bagaimana proses penyusunan surat penugasan resmi untuk juru parkir melaksanakan kegiatan parkir dan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum? 3. Bagaimana koordinasi antara Kepala Bidang Parkir dan tim yang terlibat dalam program <i>e-parking</i> dalam hal surat penugasan? 4. Apakah ada kriteria khusus untuk menjadi juru parkir, jika ada

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Yang Diamati	Interview Guide
			kriteria yang seperti apa? 5. Berapa jumlah juru parkir yang terdaftar di system Dinas Perhubungan Kota Semarang dan bagaimana cara membedakan juru parkir resmi dan juru parkir tidak resmi? 6. Bagaimana dengan adanya juru parkir, apakah tarif bisa berjalan secara progresif berdasarkan waktu yang telah ditetapkan?
	Sosialisasi program	1. Penyampaian informasi mengenai program <i>e-parking</i>	1. Bagaimana penyampaian informasi mengenai program <i>e-parking</i>? 2. Apakah efektif penyampaian informasi hanya

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Yang Diamati	Interview Guide
			dilakukan 1 bulan sekali? 3. Bagaimana upaya dalam meningkatkan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam sosialisasi <i>e-parking</i>? 4. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan sosialisasi program <i>e-parking</i>?
	Pencapaian tujuan program	1. Pelayanan parkir dilihat penerapan sistem elektronik di lokasi tertentu. 2. Sistem pelayanan dilihat dari kelancaran penggunaan sistem <i>e-parking</i>. 3. Alokasi pendapatan retribusi dilihat dari transparansi penggunaan pendapatan retribusi	1. Mengapa untuk awal percobaan sistem elektronik hanya ditetapkan 4 lokasi tertentu saja? 2. Bagaimana masyarakat dengan awal adanya program <i>e-parking</i>? 3. Bagaimana sistem pelayanan yang diberikan juru

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Yang Diamati	Interview Guide
		untuk pemeliharaan dan pengembangan fasilitas parkir.	parkir kepada pengguna layanan parkir? 4. Apakah alokasi pendapatan retribusi parkir sesuai dengan target yang ditetapkan? 5. Berapa target yang ditetapkan untuk alokasi pendapatan retribusi? 6. Bagaimana cara untuk memenuhi target alokasi pendapatan retribusi? 7. Apakah terdapat kendala dalam memenuhi target alokasi pendapatan retribusi? 8. Bagaimana Solusi untuk mengatasi kendala dalam memenuhi target alokasi pendapatan retribusi?

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Yang Diamati	Interview Guide
	Pemantauan program	1. Proses pemantauan yang berkelanjutan. 2. Pelaksanaan evaluasi dalam mencapai tujuan.	1. Bagaimana bentuk pemantauan program <i>e-parking</i> yang sudah dijalankan selama ini? 2. Apakah terdapat kendala dalam melaksanakan kegiatan pemantauan program <i>e-parking</i>? 3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mendorong kegiatan pemantauan program <i>e-parking</i>? 4. Apakah Dinas Perhubungan mengadakan evaluasi terhadap program <i>e-parking</i>? 5. Apa ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Yang Diamati	Interview Guide
			program <i>e-parking</i> ? 6. Bagaimana Dinas Perhubungan mengantisipasi kendala yang ada dalam program <i>e-parking</i> ?
Faktor penghambat efektivitas <i>e-parking</i> di tepi jalan umum dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang	Faktor penghambat dalam penelitian ini berdasarkan temuan saat penelitian berlangsung.		

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2024

1.8 Argumentasi Penelitian

Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, PAD berfungsi sebagai sumber pendapatan dan merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Oleh karena itu, kemampuan daerah untuk melaksanakan perekonomian diukur dari besarnya kontribusi yang dapat diberikan PAD terhadap APBD. Jika semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh PAD terhadap APBD maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. PAD Kota Semarang tidak mencapai target pada tahun 2023, meskipun tahun sebelumnya ada yang melampaui target. Hal ini disebabkan oleh kebocoran dalam sistem pembayaran, salah satunya adalah biaya parkir. Dapat terlihat dari pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Semarang pada

tahun 2022 sangat jauh dari target yang ditentukan. Tidak tercapainya target dan realisasi retribusi parkir di tepi jalan umum disebabkan oleh berbagai permasalahan, seperti adanya praktik parkir liar, adanya juru parkir yang memungut tarif diluar kebijakan yang telah ditentukan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan parkir yang berlaku dan masih menggunakan sistem parkir manual. Selain itu, faktor-faktor seperti ketidakteraturan dalam pemantauan dan penegakan hukum serta keterbatasan pemahaman juru parkir dan masyarakat terkait sistem elektronik.

Penulis berpendapat bahwa program ini belum efektif untuk meningkatkan pendapatan retribusi parkir dan mengurangi permasalahan terkait parkir di Kota Semarang. berdasarkan penjelasan tersebut, muncul pertanyaan penelitian yaitu “Mengapa belum efektifnya alokasi retribusi *e-parking* di tepi jalan umum terhadap PAD belum mencapai target?”. Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, penulis mencoba menganalisis lebih dalam dengan membuat cabang pertanyaan yang spesifik yaitu menganalisis efektivitas program seperti menemukan faktor penghambat efektivitas program *e-parking* dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Semarang. Dengan pernyataan yang menjadi rumusan masalah diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana efektivitas program *e-parking* Kota Semarang.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif mengumpulkan data deskriptif dari perilaku, tulisan, dan ucapan subjek penelitian, menurut Bogdan dan Taylor.

Sugiyono menyatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang hanya berfokus pada kondisi objek yang ada di alam tanpa mempertimbangkan atau mempertimbangkan hubungannya dengan faktor lain.

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk memberikan penjelasan tentang seberapa efektif program parkir e-parking di tepi jalan umum dalam meningkatkan PAD Kota Semarang serta menganalisis faktor-faktor yang menghambat program e-parking di tepi jalan umum dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah lokasi atau tempat di mana penelitian dilakukan. Situs penelitian menyediakan semua informasi yang diperlukan untuk data penelitian (Wirantna Sujaweni, 2014). Saat melakukan penelitian dengan tipe kualitatif, penetapan lokasi penelitian sangat penting karena memungkinkan untuk menentukan objek dan tujuan penelitian dengan lebih jelas. Dengan demikian, peneliti telah menetapkan bahwa penelitian akan dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai lokasi yang ditentukan.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang akan memberikan informasi mengenai fakta ataupun pendapat pribadi terkait topik yang akan diteliti. Penelitian ini akan memilih subjek yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, tentang efektivitas program *e-parking* di tepi jalan umum dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang. Dalam penelitian

ini, menggunakan teknik purposive sampling (sampel bertujuan). Menurut Sugiyono (2011), teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang sengaja dipilih karena waktu dan tujuan tertentu yang dianggap oleh penulis dapat mewakili dan memahami masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tambahan yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian. Penulis berharap dapat mengurangi kesalahan penelitian dengan melibatkan informan utama. Dalam melibatkan informan utama maka penulis berharap dapat meminimalisir kesalahan dalam penelitian. Maka dari itu, subjek dalam penelitian ini akan menjadi informan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang
- b. Seksi Pendataan Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang
- c. Juru Parkir
- d. Masyarakat pengguna layanan parkir

1.9.4 Jenis Data

Menurut Wiratna Sujarweni (2014), data yang digunakan dalam penelitian terbagi menjadi dua kategori yaitu kualitatif (biasanya kata atau kalimat yang dapat diuraikan) dan kuantitatif (biasanya angka). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data kualitatif yang terdiri dari teks atau informasi yang disampaikan oleh narasumber. Informasi yang didapatkan dari observasi dan wawancara adalah non numerik atau bukan angka melainkan dalam bentuk catatan teks atau tulisan yang mendeskripsikan temuan serta dokumentasi foto kegiatan. Hasil wawancara dengan informan diproses dan diketik dalam bentuk transkrip untuk mendukung

penelitian. Dokumen penting yang berkaitan dengan penelitian juga digunakan untuk mendapatkan data tambahan.

1.9.5 Sumber Data

Sugiyono (2009) menggambarkan sumber data sebagai semua hal yang memberikan informasi penting untuk kelangsungan penelitian terkait data penelitian. Berdasarkan sumber data tersebut, data dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang secara langsung disediakan kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui observasi langsung pada proses parkir, wawancara mendalam (in-depth interview) dengan berpedoman pada daftar pertanyaan serta pengamatan untuk memahami kondisi lapangan dan mengungkapkan kejadian atau keadaan yang dijelaskan dari hasil wawancara dengan informan dan dokumen terkait yang ditemukan di perpustakaan. Wawancara dilakukan dengan pegawai Dinas Perhubungan Kota Semarang, juru parkir, dan masyarakat pengguna layanan parkir, sehingga diperoleh data, informasi, dan keterangan mengenai efektivitas program *e-parking* di tepi jalan umum dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, seperti dari pihak ketiga atau melalui analisis dokumen yang sudah ada. Dalam penelitian ini, data sekunder yang dikumpulkan meliputi dokumen dari kantor

atau instansi terkait, publikasi, serta temuan-temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan efektivitas program *e-parking* di tepi jalan umum dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang. Data ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan dalam penelitian.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teknik Observasi

Observasi Observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk memahami kondisi sebenarnya di lapangan yang dilakukan oleh peneliti secara konsisten untuk mendapatkan fakta yang akurat. Teknik observasi melibatkan pengamatan langsung ke objek penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Proses observasi meliputi mencari informasi yang lengkap mengenai apa yang akan diobservasi, memahami tujuan khusus dan umum dari penelitian, menentukan materi atau objek yang akan diobservasi, membatasi ruang lingkup materi atau objek tersebut, dan mengidentifikasi hasil observasi dengan detail. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk memeriksa langsung terhadap efektivitas program *e-parking* di tepi jalan umum dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang.

b. Teknik Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan proses diskusi atau tanya jawab langsung dengan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Teknik yang digunakan adalah wawancara yang dimana peneliti mengajukan pertanyaan terlebih dahulu dan

mendapatkan jawaban langsung dari informan. Penelitian ini melibatkan wawancara langsung dengan pegawai Dinas Perhubungan Kota Semarang, juru parkir dan masyarakat pengguna layanan parkir. Tujuan wawancara ini untuk menilai efektivitas program *e-parking* di tepi jalan umum dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur dengan pertanyaan-pertanyaan mendalam untuk diajukan kepada responden. Selain itu, digunakan handphone sebagai alat perekam kemudian hasil jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan penelitian saat wawancara akan dicatat dan ditranskripkan untuk keperluan analisis.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data dari narasumber melalui rekaman dan dokumen. Dokumen ini mempermudah penulis dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang jelas dan konkret mengenai efektivitas program *e-parking* di tepi jalan umum dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data merupakan salah satu tahap yang memerlukan kreativitas dalam penelitian kualitatif. Meskipun proses ini memerlukan pendekatan kreatif, analisis dan interpretasi data harus dilakukan dengan metode yang eksplisit dan sistematis. Maka dari itu, sangat penting bagi peneliti untuk menganalisis dan menginterpretasikan data secara tekstual (Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro:20).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan tahapan-tahapan berikut:

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Data yang dikumpulkan perlu dicatat dengan teliti dan rinci karena menghindari hal yang tidak diinginkan. Data yang terkumpul akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Maka dari itu, penting untuk segera melakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data melibatkan proses merangkum, memilih informasi penting, memfokuskan pada elemen yang relevan, mencari tema dan pola serta membuang informasi yang tidak diperlukan. Peneliti akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan proses pengumpulan data berikutnya dengan mereduksi data. Fakta yang direduksi mencakup hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai efektivitas program *e-parking* di tepi jalan umum dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang. Peneliti perlu memperhatikan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian sehingga tujuan utama dari penelitiannya tidak keluar dari fokus penelitian.

b. Penyajian Data (Data Display)

Penelitian kualitatif biasanya menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, diagram, atau pictogram. Penyajian data ini membantu dalam mengorganisasikan data dan menyusunnya dalam pola hubungan yang memudahkan pemahaman. Dalam penelitian kualitatif, data biasanya disajikan dalam bentuk flowchart, bagan, uraian naratif, atau hubungan antar kategori. Peneliti menyajikan data dari triangulasi dan reduksi yang kemudian dianalisis untuk

menguraikan pembahasan serta mencocokkan dengan teori yang dipilih. Hasil analisis ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program *e-parking* di tepi jalan umum dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang.

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)

Penelitian ini akan menentukan seberapa efektif program *e-parking* Kota Semarang dan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan. Kesimpulan awal yang diajukan tidak stabil dan dapat berubah jika tidak didukung oleh bukti yang kuat selama tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika bukti yang kuat dan konsisten ada saat data dikumpulkan kembali, kesimpulan awal tersebut dianggap kredibel.

1.9.8 Kualitas Data

Dalam penelitian kualitatif, penting untuk mengikuti standar kredibilitas agar data yang diperoleh memiliki tingkat kebenaran dan kepercayaan yang tinggi serta sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Triangulasi merupakan metode yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data berdasarkan sumbernya, yang melibatkan perbandingan dan pengecekan berulang kali untuk memastikan informasi yang diperoleh dapat dipercaya. Triangulasi sumber berarti mengumpulkan data dari berbagai sumber berbeda tetapi dengan teknik yang sama. Dengan menerapkan triangulasi, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hasil penelitian. Teknik triangulasi sangat berguna untuk mengetahui apakah data yang diperoleh konsisten, lengkap, dan akurat serta untuk menangani perubahan atau kontradiksi dalam data. Penerapan triangulasi dalam

mengumpulkan data akan memberikan hasil yang lebih kuat dibandingkan jika hanya menggunakan dengan satu pendekatan. Langkah-langkah dalam menerapkan triangulasi data menurut Moleong (2009) sebagai berikut:

- a. Membuat sebuah perbandingan data yang memperoleh melalui aktivitas pengamatan dengan data yang didapatkan melalui aktivitas pewawancara.
- b. Membentuk sebuah perbandingan dengan pernyataan yang dikatakan kepada khalayak umum dengan pernyataan yang diungkapkan secara personal.
- c. Melakukan sebuah perbandingan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh publik terkait situasi selama penelitian berlangsung.
- d. Membentuk sebuah perbandingan terkait kondisi dan sudut pandang seseorang dalam berpendapat, yakni berdasarkan tingkat pendidikan dan kedudukannya.
- e. Melakukan sebuah perbandingan terkait hasil yang didapatkan melalui aktivitas wawancara terhadap sebuah dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, sumber data yang sama digunakan secara bersamaan untuk berbagai metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Hal ini dilakukan dengan cara melibatkan perbandingan hasil wawancara dengan narasumber yaitu pegawai Dinas Perhubungan Kota Semarang, juru parkir, dan masyarakat pengguna layanan parkir serta dengan data yang diperoleh dari observasi langsung mengenai program *e-parking* di tepi jalan umum. Selain itu, dokumen terkait juga dievaluasi dan hasil capaian kinerja pegawai Dinas Perhubungan Kota Semarang.